

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie Habib. (2009) *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.

Andri Kristanto. (2008) *Keamanan Sistem Informasi dan Implementasinya*.
Yogyakarta: Gava Media.

Andrian Sutedi. (2014). *Hukum notariat dan tafsir tematik terhadap undang-undang jabatan notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.

Boediono, H. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*.
Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadjon, P. (1997). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press

Ibrahim, J. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang:
Bayumedia Publishing.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenade Media Group.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada

Media.

MD, M. M. (2010). *Konstitusi dan Demokrasi: Pemikiran dan Praktik Hukum di*

Indonesia. Jakarta: Penerbit Kompas.

Munir Fuady. (2003). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Notodisoerjo, R. S. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta:

Raja Grafindo Persada.

Salim HS & Nurbani, C. T. , 2019 *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi*

dan Tesis. Jakarta: Rajawali Pers,.

Soerjono Soekanto (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. (2006) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti, R. (1983) *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Subekti, R. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta:

Liberty.

Sudikno Mertokusumo. (1993) *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta:

Liberty.

Sudikno Mertokusumo. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia* (Ed. 11).

Yogyakarta: Liberty.

Syahrani, R. (2004). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tobing, G. L. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Yahya Harahap. (2017) *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya Harahap. (2017) *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya Harahap. (2021) *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edisi Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Herzien Inlandsch Reglement

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 sebagai bentuk pengamanan dokumen dengan Tanda Tangan Elektronik.

Jurnal

Anggraeni, R. &. (2018). *Cyber Notary: Challenges and Oppurtunities in Indonesia*.

Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 3 (4), 112-125.

Fitcanisa, J. D., & Azheri, B. (2023) *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Akta*

Notaris. SIBATIK Journal, 2(5), 1346–1347.

Hutapea, R. &. (2020). *Legal Protection of Electronic Signatures in Digital*

Transactions in Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1, 75-90.

Purwanto, T. J., & Purwoadmojo, D. (2023) Tinjauan Yuridis Legalitas Penggunaan

Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris. *Notarius*, 16(2), 989–997.

Santosa, B. &. (2021). *Validity and Legal Force of Electronic Signatures in Notarial*

Deeds. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(2), 210-230.

Wahyudi, A. &. (2020). *Cyber Notary as a Legal Solution in the Digital Era*.

Indonesian Journal of Legal Reform 4(2), 140-158.

Yusuf, R. A. (2021). *Legalitas Akta Notaris yang Dibuat Dalam Konsep Cyber*

Notary di Masa Darurat Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(5),

1354 -1356.

Hasil Penelitian atau Tugas Akhir

Fardela, B. , 2024 *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta*

Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Novianto, Muhammad Rizi, 2021, *Analisis Yuridis Keabsahan Penggunaan Digital*

Signature Terhadap Akta Notaris, Skripsi, Program Studi Hukum Program Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang.

Putri, Ovie Sumita, 2023, *Tinjauan Yuridis Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian*

Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dengan Menggunakan Aplikasi Privy Dalam Perjanjian Berdasarkan KUHPdata, Skripsi, Program Studi Hukum Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau.

Rossalina, Zainatun, 2016, *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber*

Notary Sebagai Akta Autentik, Program Studi Magister Kenotariatan, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang.

Internet

Detik.com. (2025). *Tata cara mengurus sertifikat tanah elektronik beserta syaratnya*.

Detik Jateng. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7772872/tata-cara-mengurus-sertifikat-tanah-elektronik-beserta-syaratnya>. diakses pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, pukul 08.30 WIB.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. (2023). Desimenasi

Tanda Tangan Elektronik.

<https://www.bkpsdm.purwakartakab.go.id/read/berita/79> diakses pada hari

Minggu, 5 April 2025, pukul 23.19 WIB.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). *Pengenalan*

tanda tangan elektronik dan pemanfaatannya dalam pemerintahan

digital. Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika. <https://jdih.komdigi.go.id>

diakses pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2025, pukul 13.16 WIB.

Pemerintah Kota Batu. (2018). Pemkot Batu Bakal Terapkan Tanda Tangan Digital.

TIMES Indonesia. [https://timesindonesia.co.id/peristiwa-](https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/170388/pemkot-batu-bakal-terapkan-tanda-tangan-digital)

[daerah/170388/pemkot-batu-bakal-terapkan-tanda-tangan-digital](https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/170388/pemkot-batu-bakal-terapkan-tanda-tangan-digital) diakses pada

hari Selasa, tanggal 9 April 2025, pukul 16.25 WIB.

Pengadilan Agama Kandangan. *Mahkamah Agung Republik*

Indonesia. <https://mpp.hulusungaiselatankab.go.id/pengadilan/agama/ecourt>.

diakses pada hari Jum'at, tanggal 21 Maret 2025, pukul 12.38 WIB.